

Analisis Diskursus Pidato Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) dalam Penanganan Banjir Jakarta

Adhelya Fianny¹, Dejhawe Al Jannah²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email Korespondensi: fiannyadhelya@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis diskursus pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penanganan banjir menggunakan model Analisis Wacana Kritis (CDA) Teun A. Van Dijk. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan empat korpus pidato periode Februari–Desember 2025. Analisis teks mencakup level makrostruktur, superstruktur, sedangkan analisis konteks sosial-politik mencakup dimensi situasional, institusional, dan sosio-historis. Temuan menunjukkan dua tema makro dominan: keberlanjutan kebijakan sebagai strategi legitimasi, keterbatasan pemerintah dan kolaborasi multistakeholder, serta penanganan banjir proaktif dan terencana. Analisis superstruktur mengungkap pola adaptif komunikasi pemerintahan. Analisis konteks menunjukkan bahwa produksi wacana dipengaruhi tekanan publik melalui media digital, posisi institusional gubernur, dan konteks sosio-historis Jakarta pasca-pemindahan ibu kota. Penelitian ini membuktikan bahwa pidato kepala daerah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun legitimasi pemerintahan dan mengelola ekspektasi publik.

Kata kunci; Motivasi; Kepuasan; Kinerja; Karyawan.

Abstract: This study analyzes the discourse of Jakarta Governor Pramono Anung's speeches on flood management using Teun A. Van Dijk's Critical Discourse Analysis (CDA) model. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach with four speech corpora spanning February to December 2025. Text analysis covers macrostructure, superstructure levels, while socio-political context analysis examines situational, institutional, and socio-historical dimensions. Findings reveal three dominant macro themes: policy continuity as legitimation strategy, government limitation and collaborative governance, and proactive long-term flood management. Superstructure analysis shows adaptive communication patterns ranging from formal inauguration to crisis response and visionary policy communication. Contextual analysis indicates that discourse production was influenced by public pressure through digital media, the Governor's institutional position, and Jakarta's socio-historical context as a post-capital relocation city. This study demonstrates that political speeches function not merely as policy information tools but as strategic instruments for constructing governance legitimacy and managing public expectations.

Keywords: Motivation; Satisfaction; Job; Performance.

Article History :

Received 25-06-2026; Revised 13-07-2026; Accepted 04-08-2026

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di seluruh dunia dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat perkotaan. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC (2021), frekuensi dan intensitas banjir perkotaan di berbagai belahan dunia terus meningkat seiring dengan percepatan

perubahan iklim global dan laju urbanisasi yang tidak terkendali. Kondisi ini mendorong banyak negara, terutama negara berkembang, untuk memperkuat kapasitas tata kelola bencana dan kebijakan mitigasi risiko banjir secara komprehensif.

Dalam konteks perkotaan modern, banjir tidak lagi dipandang semata-mata sebagai peristiwa alam yang bersifat siklikal, melainkan juga sebagai persoalan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan manajemen lingkungan yang berkaitan erat dengan kapasitas pemerintah dalam mengelola ruang kota secara berkelanjutan. Pertambahan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur yang masif, perubahan penggunaan lahan, serta berkurangnya area resapan air mengakibatkan banyak kota besar menghadapi peningkatan risiko banjir setiap tahunnya (Rijke et al., 2012). Oleh karena itu, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis-hidrologis, tetapi juga memerlukan pendekatan tata kelola yang melibatkan koordinasi antarinstansi, kebijakan tata ruang yang terintegrasi, serta komunikasi publik yang efektif.

Di negara-negara Asia Tenggara, permasalahan banjir perkotaan menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor geografis, kepadatan penduduk yang tinggi, dan keterbatasan kapasitas infrastruktur drainase. Kota-kota seperti Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, dan Jakarta secara rutin menghadapi banjir besar yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial yang tidak sedikit (Garschagen et al., 2018). Pengalaman kota-kota tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir yang efektif memerlukan kombinasi antara kebijakan struktural jangka panjang, kapasitas kelembagaan pemerintah yang kuat, serta kemampuan komunikasi publik yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Permasalahan banjir Jakarta telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi isu yang selalu muncul dalam setiap periode kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Kondisi geografis Jakarta yang sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah, ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari daerah hulu seperti Bogor dan Depok, menjadikan banjir sebagai ancaman yang bersifat struktural dan berulang (Texier, 2008). Pada tahun 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali memprioritaskan masalah banjir. Berbeda dengan pendekatan era gubernur sebelumnya, Pramono Anung berupaya membangun diskursus yang lebih teknokratis dan kolaboratif, sebagaimana tercermin dalam pidato dan pernyataannya sepanjang tahun 2025.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji diskursus dalam pidato politik dan komunikasi pemerintahan. Dewi dkk. (2025) menelaah pidato Presiden Republik Indonesia melalui pendekatan Van Dijk dan mendapati bahwa pidato pejabat publik merupakan media krusial untuk membangun dukungan terhadap kebijakan. Ekayanta (2022) mengungkapkan bahwa pidato resmi merupakan arena di mana hubungan kekuasaan dan makna politik dibangun. Fathonah (2025) menemukan bahwa teknik legitimasi merupakan elemen utama dalam pidato perdana seorang gubernur. Gunawibawa dan Oktiani (2020) menekankan bagaimana isu banjir di Jakarta sering kali menjadi ajang pertarungan politik, sedangkan Puspitasari (2020) menunjukkan bahwa pemberitaan banjir juga membentuk persepsi publik terhadap gubernur DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2024) juga mengungkapkan bahwa masyarakat tidak hanya mengevaluasi kinerja teknis pemerintah, tetapi juga menilai kualitas komunikasi publik yang dilakukan saat banjir terjadi.

Analisis Wacana Kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA) model Teun A. Van Dijk dipilih sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini karena kemampuannya mengungkap hubungan antara struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi produksi wacana. Van Dijk (1993) mengembangkan model yang mencakup tiga dimensi: dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial, yang secara integratif mampu mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam komunikasi politik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana struktur teks pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung digunakan dalam membangun narasi kebijakan penanganan banjir Jakarta, serta bagaimana konteks sosial-politik yang melingkupi persoalan banjir tercermin dalam pidato tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks pidato serta pernyataan resmi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai pengelolaan banjir di Jakarta. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk menjelajahi dan memahami makna yang dipandang oleh individu atau kelompok tertentu sebagai berasal dari isu sosial atau kemanusiaan.

Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (CDA) berdasarkan model tiga dimensi yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk (1993). Model ini mencakup: (1) analisis teks yang meneliti struktur bahasa pada level makro, superstruktur, dan mikro; (2) analisis kognisi sosial yang meneliti bagaimana ideologi dan pengetahuan pembicara memengaruhi produksi wacana; serta (3) analisis konteks sosial yang meneliti kondisi sosial, budaya, dan politik yang menjadi latar belakang wacana.

Fokus penelitian adalah analisis wacana dari pidato serta pernyataan resmi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai penanganan banjir di Jakarta dalam periode Februari 2025 sampai Desember 2025. Data primer penelitian mencakup empat korpus pidato/ pernyataan resmi gubernur sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Primer

No.	Judul Pidato	Tanggal	Kutipan Kunci	Link Media
1.	Pidato perdana setelah pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2025–2030	20 Februari 2025	"Saya secara terbuka menyampaikan, bahwa saya akan melanjutkan hal-hal yang baik (gubernur sebelumnya). Hal-hal yang baik dari Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok dan hal-hal yang baik dari Mas Anies (akan dilanjutkan)."	https://m.beritajakarta.id/read/142755/pramono-anung-sampaikan-pidato-perdana-di-rapat-paripurna-dprd-dki https://rri.co.id/regional/1337570/pidato-perdana-pramono-janji-lanjutkan-program-gubernur-sebelumnya

No.	Judul Pidato	Tanggal	Kutipan Kunci	Link Media
2.	Tinjauan langsung kondisi Pintu Air Manggarai yang mencapai debit 850 cm (Siaga 2) akibat luapan Sungai Ciliwung	4 Maret 2025	<i>"Dari kemarin diteror urusan banjir. Tapi saya dengan senang hati ingin menangani ini, secara sungguh-sungguh." · "Saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik dengan jumlah total 500 pompa, saya minta semua diaktifkan."</i>	https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/04/16312851/banjir-jakarta-pramono-anung-tinjau-pintu-air-manggarai
3.	Apel siaga pasca-banjir besar 6–8 Juli 2025 di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan	8 Juli 2025	<i>"Kalau melihat banjir yang kemarin terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan." · "Saya ingin meminta maaf kepada masyarakat yang terkena dampak banjir." · "Selama empat bulan masa kepemimpinan saya, ini adalah pertama kalinya banjir terjadi bersamaan akibat tiga faktor sekaligus..."</i>	https://www.tempo.co/politik/pramono-anung-minta-maaf-belum-bisa-atasi-banjir-di-jakarta-1935169 https://www.metrotvnews.com/play/bVDCjyg8-jakarta-kebanjiran-lagi-pramono-anung-minta-maaf-kepada-warga-terdampak https://news.detik.com/berita/d-8002389/kata-maaf-dari-pramono-gara-gara-banjir-masih-hantui-jakarta
4.	Penandatanganan kontrak Proyek Pengendalian Banjir Jakarta (JakTirta) dan NCICD Fase A Tahap 3 TA 2025–2027 senilai Rp2,62 triliun di Balai Kota Jakarta	24 Desember 2025	<i>"Penanganan banjir di Jakarta tidak bisa hanya jangka pendek atau kalau sudah banjir baru tergopoh-gopoh." · "Saya tidak mau lagi setelah tanggal 15 sampai 30 Desember semua orang sibuk hanya untuk menghabiskan anggaran."</i>	https://megapolitan.kompas.com/read/2025/12/24/12464181/pramono-ingatkan-dinas-sda-soal-penanganan-banjir-jangan-kerjakan-proyek

Sumber: diolah oleh peneliti

Data sekunder meliputi berita dan laporan media massa terkait penanganan banjir Jakarta pada masa kepemimpinan Pramono Anung dari berbagai sumber terpercaya seperti Kompas.com, Tempo.co, Tirto.id, dan Tribunnews.com, serta dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademis tentang CDA model Van Dijk, komunikasi politik, dan kebijakan penanganan banjir.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) Dokumentasi, yakni mengumpulkan teks pidato dari sumber daring yang dapat diverifikasi; (2) Studi Pustaka, yakni menelaah literatur ilmiah relevan untuk membangun kerangka teoretis; dan (3) Observasi Tekstual, yakni pembacaan mendalam terhadap teks untuk mengidentifikasi pola-pola wacana. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, verifikasi referensi, dan member checking konseptual berdasarkan kerangka teori Van Dijk (1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pramono Anung Wibowo dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta ke-15 pada 20 Februari 2025, berpasangan dengan Wakil Gubernur Rano Karno, untuk masa jabatan 2025–2030. Sebelum menjabat, ia dikenal sebagai politisi senior PDI-P yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015–2024), serta Wakil Ketua DPR RI periode 2009–2014. Latar belakangnya sebagai birokrat senior memengaruhi gaya komunikasi politiknya yang cenderung deliberatif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan kebijakan.

Sepanjang tahun 2025, Jakarta mengalami sedikitnya dua peristiwa banjir signifikan: banjir awal Maret 2025 akibat meluapnya Sungai Ciliwung dengan ketinggian air di Pintu Air Manggarai mencapai 850 sentimeter, serta banjir Juli 2025 yang disebabkan kombinasi tiga faktor sekaligus (banjir dari hulu, hujan lebat, dan rob). Data menunjukkan bahwa selama kepemimpinan Pramono Anung, dampak banjir berkurang dibandingkan periode gubernur sebelumnya, yakni memengaruhi 4 kecamatan dan 30 kelurahan dengan 1.349 orang terdampak.

Berdasarkan model analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk, makrostruktur mengacu pada tema atau isu utama yang menjadi fondasi suatu teks. Berdasarkan kajian terhadap empat korpus pidato dan pernyataan Gubernur Pramono Anung sepanjang tahun 2025, terungkap tiga tema besar yang secara berulang muncul sebagai kerangka penting dalam narasi kebijakan banjir.

Analisis Makrostruktur

Tema Makro Keberlanjutan dan Kestinambungan Kebijakan

Tema keberlanjutan merupakan tema dominan yang muncul dalam Korpus Data 1 (Pidato Perdana, 20 Februari 2025). Pada tahap awal kepemimpinannya, Pramono Anung tidak membangun citra sebagai pemimpin yang membawa perubahan radikal, tetapi menempatkan diri sebagai figur yang melanjutkan proses pembangunan yang telah berlangsung sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam pernyataannya:

"Saya secara terbuka menyampaikan, bahwa saya akan melanjutkan hal-hal yang baik (gubernur sebelumnya). Hal-hal yang baik dari Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok dan hal-hal yang baik dari Mas Anies (akan dilanjutkan)." (RRI.co.id, 20 Februari 2025)

Dari sudut pandang analisis wacana kritis, pernyataan tersebut bukan sekadar janji meneruskan program yang ada. Pramono berupaya menciptakan narasi kelangsungan kebijakan sebagai basis legitimasi politik di awal masa pemerintahannya. Pilihan ini memiliki fungsi politik yang sangat strategis: dengan menghargai kebijakan gubernur sebelumnya dari

berbagai latar belakang politik, Pramono membangun citra kepemimpinan yang inklusif sekaligus menguatkan legitimasi kebijakan banjir sebagai agenda bersama. Temuan ini sejalan dengan Fathonah (2025) yang menyatakan bahwa pidato perdana gubernur berfungsi strategis dalam membangun legitimasi kekuasaan dan memperkuat citra pemerintahan.

Tema Makro Keterbatasan Pemerintah dan Kerja Sama Berbagai Pihak

Tema kedua paling jelas terlihat dalam Korpus Data 3 (Pernyataan Apel Petugas, 8 Juli 2025) yang disampaikan setelah banjir besar melanda Jakarta. Pernyataan itu terlihat dalam kutipan:

"Kalau melihat banjir yang kemarin terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan." "Selama empat bulan masa kepemimpinan saya, ini pertama kalinya banjir terjadi bersamaan akibat tiga faktor sekaligus: banjir dari hulu, curah hujan tinggi di Jakarta, dan meningkatnya permukaan air laut atau rob." (Tempo.co, 9 Juli 2025)

Dalam sudut pandang makrostruktur, inti tema yang diangkat bukan hanya soal penyebab banjir, tetapi juga tentang konstruksi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi situasi yang rumit. Pemakaian istilah banjir kiriman, hujan lebat, dan rob menciptakan narasi bahwa pemerintah menghadapi keadaan yang luar biasa. Penggunaan frasa "tidak bisa dilawan" menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan pengendalian total menuju pendekatan adaptif. Tema kolaborasi multistakeholder berperan ideologis dalam usaha redistribusi tanggung jawab: penanganan banjir tidak lagi sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi, melainkan dibagi kepada berbagai aktor sosial dan struktural lainnya. Temuan ini sejalan dengan Tresnanti dkk. (2024) yang menegaskan bahwa komunikasi kebencanaan yang efektif menuntut adanya responsivitas dan pengakuan pemerintah terhadap pengalaman masyarakat terdampak.

Tema Makro Penanganan Banjir Proaktif dan Terencana

Tema ketiga terlihat jelas dalam Korpus Data 4 (Sambutan Proyek JakTirta, 24 Desember 2025). Pramono Anung membangun wacana berorientasi masa depan dengan narasi penanganan banjir yang sistematis dan antisipatif. Hal tersebut tampak dalam pernyataannya:

"Penanganan banjir di Jakarta tidak bisa hanya jangka pendek atau kalau sudah banjir baru tergopoh-gopoh." (Kompas.com, 24 Desember 2025)

Secara linguistik, frasa "tidak bisa hanya jangka pendek" menunjukkan penolakan terhadap pendekatan lama yang dianggap bersifat sementara dan parsial. Frasa ini menciptakan oposisi makna antara orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang. Dalam analisis Van Dijk (1993), hal ini merupakan strategi diskursif untuk menciptakan batas antara model tata kelola lama dan model tata kelola yang hendak dibangun. Pemakaian istilah "tergopoh-gopoh" mencerminkan implicit evaluation strategy, yakni penyampaian kritik secara tidak langsung melalui pilihan bahasa yang mengarahkan pembaca pada penilaian tertentu. Secara keseluruhan, tema proaktif ini berfungsi ganda: sebagai mekanisme legitimasi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir jangka panjang, dan sebagai strategi pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Jika ditinjau secara kronologis, tema-tema ini memperlihatkan adanya evolusi strategi wacana yang dinamis: legitimasi melalui keberlanjutan di awal pemerintahan, narasi kompleksitas dan keterbatasan saat menghadapi banjir besar, dan wacana proaktif antisipatif menjelang akhir tahun. Hal ini menegaskan pandangan Syah (2024) bahwa pemilihan tema dalam pidato politik mencerminkan ideologi kepemimpinan sekaligus strategi komunikasi yang dirancang secara sistematis.

Analisis Superstruktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Gubernur Pramono Anung memiliki pola penyusunan wacana yang adaptif dan konsisten. Meskipun disampaikan dalam situasi yang berbeda-beda, keempat korpus data memperlihatkan kerangka skema yang serupa: diawali dengan pengenalan konteks persoalan, dilanjutkan dengan penjelasan penyebab dan langkah penanganan, kemudian ditutup dengan komitmen kebijakan atau ajakan kolaborasi. Dalam perspektif Van Dijk (1993), superstruktur mencerminkan bagaimana aktor politik mengorganisasi argumen untuk menghasilkan efek tertentu terhadap persepsi publik.

Pada Korpus Data 1 (Pidato Perdana), skema wacana menampilkan pola pidato inaugurasi formal dengan tiga segmen: pengakuan terhadap forum DPRD dan apresiasi kepercayaan rakyat; deklarasi visi dan komitmen kebijakan; serta ajakan kerja sama lintas partai. Pada Korpus Data 2 (Tinjauan Pintu Air Manggarai), skema bergeser menjadi pola komunikasi krisis responsif: pengakuan eksplisit terhadap tekanan publik, pemaparan kondisi faktual, dan penegasan komitmen. Pada Korpus Data 3 (Apel Siaga Pasca-Banjir Besar), skema menjadi paling kompleks dengan memadukan tiga segmen yang jarang hadir bersamaan: pertanggungjawaban berupa permintaan maaf; analisis kausal multidimensi; dan orientasi ke depan berupa komitmen solusi jangka panjang. Pada Korpus Data 4 (Penandatanganan Kontrak JakTirta), skema wacana bergeser penuh menuju pola komunikasi kebijakan visioner yang berorientasi pada perencanaan strategis.

Secara keseluruhan, hasil analisis superstruktur memperlihatkan bahwa pola skema wacana Gubernur Pramono Anung bersifat dinamis dan menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi. Fleksibilitas ini mencerminkan kapasitas tata kelola komunikasi pemerintahan yang efektif. Temuan ini sejalan dengan Canel (2007) yang menegaskan bahwa efektivitas komunikasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan pesan dengan konteks sosial dan kebutuhan audiens.

Analisis Konteks Sosial-Politik

Berdasarkan perspektif CDA Van Dijk, produksi wacana tidak dapat dipahami hanya melalui analisis struktur teks semata. Hasil penelitian menemukan tiga dimensi konteks sosial-politik utama yang memengaruhi pidato Gubernur Pramono Anung.

Konteks Situasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato dan pernyataan Gubernur Pramono Anung terkait banjir Jakarta tidak diproduksi dalam ruang sosial yang netral. Pengakuan eksplisit dalam Korpus Data 2 bahwa dirinya "diteror urusan banjir" memperlihatkan kesadaran gubernur terhadap tingginya ekspektasi masyarakat sekaligus menunjukkan posisi

pemerintah sebagai aktor yang terus berada dalam pengawasan publik. Sejalan dengan temuan Lestari dkk. (2024), masyarakat Jakarta memanfaatkan berbagai platform digital untuk menilai responsivitas pemerintah secara real time. Dalam situasi banjir besar Juli 2025, strategi komunikasi berupa permintaan maaf secara terbuka dapat dipahami sebagai strategi pemulihan kepercayaan publik, sebagaimana ditekankan oleh Tresnanti dkk. (2024).

Konteks Institusional

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menempati posisi yang memiliki karakteristik berbeda dibanding kepala daerah lain. Status politik Jakarta yang khas dan perhatian media nasional menjadikan setiap pernyataan gubernur dipahami dalam konteks politik yang lebih luas, tidak hanya konteks administratif. Narasi keberlanjutan kebijakan dan kolaborasi yang dibangun Pramono memiliki fungsi politik yang lebih luas: menciptakan dukungan kelembagaan dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan Fathonah (2025) yang menyatakan bahwa pidato kepala daerah berfungsi sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan dan pembentukan legitimasi politik.

Konteks Sosio-Historis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Pramono Anung dipengaruhi oleh konteks sosio-historis yang melekat pada isu banjir Jakarta. Gunawibawa dan Oktiani (2020) menjelaskan bahwa isu banjir Jakarta selama ini sering menjadi arena kompetisi politik antarpemimpin daerah. Namun analisis menunjukkan bahwa Pramono berupaya membangun pola diskursus yang berbeda: wacana yang dibangun cenderung menggeser isu banjir dari arena konflik politik menuju pendekatan yang lebih teknokratis dan kolaboratif. Perubahan orientasi ini relevan dalam konteks Jakarta pasca-pemindahan ibu kota ke Nusantara, ketika masyarakat lebih mengharapkan solusi konkret dibandingkan narasi politik yang bersifat simbolik.

Pembahasan

Hasil kajian terhadap struktur teks pidato Gubernur Pramono Anung memperlihatkan bahwa wacana mengenai penanganan banjir di Jakarta dibentuk sebagai konstruksi naratif yang sistematis dengan tujuan retorik tertentu. Temuan ini mendukung pandangan Van Dijk (1993) yang menyatakan bahwa wacana politik senantiasa memuat dimensi ideologis yang dibentuk melalui pilihan bahasa yang tidak bersifat netral.

Pada tingkat makrostruktur, penelitian ini menunjukkan bahwa Pramono Anung membangun wacana melalui tiga tema utama yang membentuk konstruksi naratif mengenai model kepemimpinan adaptif dalam menghadapi persoalan banjir yang kompleks dan struktural. Ketiga tema tersebut dipilih secara sadar sesuai dengan situasi dan konteks masing-masing pidato, sejalan dengan penelitian Syah (2024) yang menjelaskan bahwa pemilihan tema dalam pidato politik mencerminkan ideologi kepemimpinan sekaligus strategi komunikasi yang dirancang secara sistematis.

Pada tingkat superstruktur, rangkaian pola skema yang ditemukan tidak bersifat kebetulan, melainkan mencerminkan strategi komunikasi pemerintahan yang secara konsisten berupaya membangun dan mempertahankan legitimasi kebijakan. Temuan ini mendukung

Canel (2007) yang menekankan bahwa efektivitas komunikasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor politik dalam menyesuaikan pesan dengan konteks sosial, sekaligus mendukung Fathonah (2025) yang menyatakan bahwa pidato kepala daerah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.

Dari sudut pandang konteks sosial-politik, temuan penelitian ini mendukung pandangan Fairclough dan Wodak (1997) yang menegaskan bahwa praktik diskursus tidak pernah hadir secara terpisah dari kondisi sosial yang melatarbelakangi proses pembentukannya. Perubahan orientasi wacana dari perspektif partisan menuju pendekatan teknokratis juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mengelola kebijakan fisik terkait penanganan banjir, tetapi juga mengelola cara masyarakat memahami proses kebijakan itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai wacana pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penanganan banjir Jakarta melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. Van Dijk, dapat disimpulkan bahwa pidato kepala daerah tidak semata-mata berfungsi sebagai media penyampaian informasi kebijakan, melainkan sebagai sarana strategis dalam membentuk konstruksi makna, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta membangun persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Pada aspek struktur teks, pada tingkat makrostruktur ditemukan tiga tema dominan: keberlanjutan program pemerintahan, penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan, serta perubahan pendekatan penanganan banjir dari pola respons jangka pendek menuju kebijakan yang lebih sistematis dan berorientasi jangka panjang. Pada tingkat superstruktur, terdapat fleksibilitas dan kapasitas adaptasi dalam penyusunan skema wacana yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, mencerminkan strategi komunikasi pemerintahan yang dinamis.

Pada aspek konteks sosial-politik, pembentukan wacana dipengaruhi oleh tekanan publik melalui media massa dan media sosial, posisi institusional Gubernur DKI Jakarta sebagai aktor strategis dalam sistem pemerintahan perkotaan, dan upaya menggeser narasi banjir dari isu yang cenderung bersifat politis menuju pendekatan yang lebih teknokratis dan berbasis penyelesaian masalah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dimensi kognisi sosial melalui wawancara mendalam dengan aktor utama maupun tim komunikasi yang terlibat dalam proses penyusunan pidato, serta menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan konstruksi wacana antarmasa kepemimpinan gubernur yang berbeda.

REFERENSI

Dewi, L. L., Nurjaya, I. G., & Utama, I. D. G. B. (2025). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk Pidato Perdana Presiden RI 2024: Critical Discourse Analysis Of Teun A. Van Dijk's Model Of The President Of The Republic Of Indonesia's Inaugurative Speech In 2024. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha*, 15(3), 336-347.

- Ekayanta, F. B. (2022). Analisis Diskursus Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2022. *Komunika*, 18(2), 9-16.
- Fathonah, S. F. (2025). Analisis Wacana Kritis Pada Pidato Gubernur Kalimantan Tengah Berdasarkan Model Tiga Dimensi Fairclough. *Jurnal Borneo Humaniora*, 8(2), 65-71.
- Febriandy. (2025). Analisis wacana kritis komunikasi politik Presiden Joko Widodo: Citra kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan. *Jurnal Komunikasi Publik*, 7(1), 34–52.
- Gunawibawa, E. Y., & Oktiani, H. (2020). Politik & bencana banjir Jakarta 2020: Analisis peta percakapan# JakartaBanjir. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 60-75.
- Lestari, P., Rahmawati, D., & Kurniawan, A. (2024). Respons masyarakat terhadap banjir Jakarta melalui media sosial Twitter/X: Analisis sentimen dan evaluasi kebijakan publik. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 45–62.
- Puspitasari, K. (2020). Kapabilitas dan Kepemimpinan Anies Baswedan dalam Penanganan Banjir Jakarta di Detik. com dan Kompas. com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 221-238.
- Syah, R. (2024). Ideologi dan strategi komunikasi dalam pidato politik: Sebuah kajian linguistik kritis. *Jurnal Bahasa dan Politik*, 11(2), 144–161.
- Tapiheru, J., & Santoso, B. (2021). Analisis wacana kritis dan konstruksi realitas sosial dalam komunikasi politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(3), 310–328.
- Tresnanti, dkk. (2024). Komunikasi bencana hidrometeorologi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Bencana Indonesia*, 10(1), 22–40.
- Yazid, M. H., & Abrian, R. (2023). A Dekonstruksi Kekuatan Politik: Kritis Terhadap Wacana Pidato Megawati Soekarnoputri dalam Konsolidasi Relawan PDI Perjuangan pada 22 Agustus 2023: Analisis Wacana. *JB: Jurnal Bahasa Indonesia*, 1(1), 38-47.
- Canel, M. J. (2007). *Communicating governments: A three-country comparison of how governments communicate with citizens*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. Dalam T. A. van Dijk (Ed.), *Discourse as social interaction* (hlm. 258–284). Sage Publications.
- Garschagen, M., Hagenlocher, M., Comes, M., Dubbert, M., Sabelfeld, R., Lee, Y. J., Grunewald, L., Lanzendörfer, M., Mucke, P., Neuschäfer, O., Pott, S., Post, J., Schramm, S., Schumann-Bölsche, D., Vandemeulebroecke, B., Welle, T., & Birkmann, J. (2018). *World risk report 2016*. Bündnis Entwicklung Hilft.
- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Natadirja, B. M., Mayasari, M., & Hariyanto, F. (2020). Representasi Peristiwa Pidato Joko Widodo Pada Media kompas. com “Politikus Sontoloyo”: Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 225-241.

- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi politik: Komunikator, pesan, dan media* (Terjemahan T. Mahayana). Remaja Rosdakarya.
- Prasojo, E. (2009). *Reformasi kedua: Melanjutkan estafet reformasi*. Salemba Humanika.
- Rijke, J., van Herk, S., Zevenbergen, C., & Ashley, R. (2012). Room for the river: Delivering integrated river basin management in the Netherlands. *International Journal of River Basin Management*, 10(4), 369–382. <https://doi.org/10.1080/15715124.2012.727111>
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Texier, P. (2008). Floods in Jakarta: When the extreme reveals daily structural constraints and mismanagement. *Disaster Prevention and Management*, 17(3), 358–372. <https://doi.org/10.1108/09653560810887284>
- Van Dijk, T. A. (1993). *Elite discourse and racism*. Sage Publications.
- m.beritajakarta.id. <https://m.beritajakarta.id/read/142755/pramono-anung-sampaikan-pidato-perdana-di-rapat-paripurna-dprd-dki>
- megapolitan.kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/04/16312851/banjir-jakarta-pramono-anung-tinjau-pintu-air-manggarai>
- megapolitan.kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/12/24/12464181/pramono-ingatkan-dinas-sda-soal-penanganan-banjir-jangan-kerjakan-proyek>
- metrotvnews.com. <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCjyg8-jakarta-kebanjiran-lagi-pramono-anung-minta-maaf-kepada-warga-terdampak>
- news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-8002389/kata-maaf-dari-pramono-gara-gara-banjir-masih-hantui-jakarta>
- rri.co.id. <https://rri.co.id/regional/1337570/pidato-perdana-pramono-janji-lanjutkan-program-gubernur-sebelumnya>
- tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/pramono-anung-minta-maaf-belum-bisa-atasi-banjir-di-jakarta-1935169>